



PERUBAHAN RENCANA KERJA APBD TAHUN 2022

**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan HidayahNya semata, akhirnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2021 ini dapat kami susun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022 ini telah tercermin dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dengan telah selesainya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022 ini, kami berharap dapat menjadikan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas operasional Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022 ini, oleh karenanya kami sangat berterimakasih atas saran dan kritik yang ada demi perbaikan di masa mendatang.

Probolinggo, 27 Juni 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PTSP DAN TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO



MUHAMMAD ABAS, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740407 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penyusunan.....	3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN 2020	5
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	11
3.1 Tujuan dan Sasaran	11
3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	12
BAB IV PENUTUP.....	13
LAMPIRAN	
➤ Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021	

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Perubahan RENJA didasarkan pada penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Perubahan RKPD dan Perubahan RENJA Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan Perubahan RKPD dan Perubahan RENJA Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Probolinggo.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilanjutkan dengan Perubahan RENJA Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Perubahan RKPD dan Perubahan RENJA Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, Perubahan RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk di dalamnya arah kebijakan fisik dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2021 dan pendanaannya menggunakan Renja K/L dan rancangan RKPD Provinsi sebagai bahan masukan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- h. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
- i. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
- j. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022 bermaksud untuk mewujudkan komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun prioritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022;
- b) Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022;
- c) Mengevaluasi / mereview hasil kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tahun sebelumnya;
- d) Mencari solusi / pemecahan masalah yang dihadapi pada tahun sebelumnya agar tidak terjadi di tahun yang akan datang;
- e) Sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dan tenaga kerja selama 1 (satu) tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2022.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2022

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3 Program dan Kegiatan;

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;

c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Hasil evaluasi pelaksanaan renja memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian renstra sampai dengan 2022 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

N>Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020 s.d 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) (Tahun 2020 s.d 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target (Tahun 2021)	Realisasi (Tahun 2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022) (Tw 2)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(kolom 5+7+9)	11=(kolom 10/9 x 100)
Tahun 2020										
	Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase capaian kinerja program minimal 80%	70,80%	77,39%						
	Pengelolaan Administrasi Keuangan	- Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%						
		-Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian 80%	100%	78,57%						
	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	- Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	80%	80%						
		- Persentase administrasi kepegawain yang tepat waktu	90%	90%						
	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase capaian kinerja kegiatan minimal 80%	80%	80%						
	Program Peningkatan Penanaman Modal	Persentase potensi dan peluang investasi yang dipromosikan	1,2%	1,2%						
	Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	- Jumlah calon investor yang difasilitasi	600 Investor	2918 Investor						
		- Jumlah potensi penanaman modal yang dipromosikan	1 Potensi	2 Potensi						
	Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah hasil monitoring, evaluasi perizinan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	100 Pelaku Usaha	90 Pelaku Usaha						
		Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	12 kali	10 Kali						
		Jumlah pelaku usaha yang tertib ketentuan penanaman modal	16 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha						
	Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah data perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi	30 Data	32 Data						

	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase izin yang terbit tepat waktu	92,50%	97,27						
	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan	Jumlah izin bidang pembangunan yang terbit tepat waktu	360 Pemohon	789,00						
	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perdagangan dan Jasa	Jumlah izin bidang perdagangan dan jasa yang terbit tepat waktu	780 Pemohon	1.474,00						
	Program Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	78,30%	98,89						
	Penempatan dan Perluasan Kerja	Jumlah pencari kerja yang melalui job fair	78,30%	180,00						
		Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan bagi wirausaha sektor informal	78,30%							
	Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	78,30%	48,00						
	Balai Latihan Kerja	Jumlah peserta yang mengikuti peltihan di UPTD BLK	78,30%	288,00						
	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	61,40%	96,66%						
	Penguatan Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kemasyarakatan hubungan industrial dan keterampilan negoisasi dalam hubungan industrial	77,20%	98,61%						
	Fasilitasi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial	Persentase perusahaan yang memenuhi pesyaratan kerja	64,50%	92,65%						
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	78,30%	98,10%						
	Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja dan masyarakat	78,30%	98,10%						
Tahun 2021										
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan kesempatan kerja			83,30	83,30				
	Pelaksanaan Pelatin berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbagai Jenis Kejuruan dan Kewirausahaan			144,00	144,00				
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbagai Jenis Kejuruan dan Kewirausahaan			144	144				
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta dan Pra Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatiha di Balai Latihan Kerja			100	100				

	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan kesempatan kerja			83,30%	83,30%				
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Permohonan Kartu AK 1			650	650				
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Permohonan Kartu AK 1			650	650				
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Melamar Melalui Job Market Fair (JMF)			1000	1000				
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Melamar Melalui Job Market Fair (JMF)			1000	1000				
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	Jumlah Calon Pekerja Imigran Indonesia			12,00	12,00				
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Calon Pekerja Imigran Indonesia			12	12				
	urusan PEMERINTAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
	PROGRAM PENUNJANG urusan PEMERINTAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%			100	100				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja kegiatan Minimal 80%			100	100				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan			7	7				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan			7	7				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan			80	80				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu			100	100				
	Pelaksanaan PenataUsahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi			80	80				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			25	25				
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan			80	80				
	PenataUsahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan			80	80				

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan			80	80				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi			80	80				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi			80	80				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi			80	80				
	Penyediaan Ban Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi			80	80				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi			80	80				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi			80	80				
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terkoneksi			80	80				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi			80	80				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah realisasi Peralatan dan Mesin Lainnya			80	80				
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketatalaksanaan tepat waktu			80	80				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa surat menyurat yang terpenuhi			85	85				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi			87	87				
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi			87	87				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi			87	87				
	pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi			80	80				
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan atau Lapangan yang terpenuhi			80	80				
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi			87	87				
	pemeliharaan Mebel	Persentase mebel yang terpelihara			80	80				

	pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara			87	87				
	pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya	Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara			87	87				
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang Dipromosikan			1,30	1,30				
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan peta potensi dan peluang usaha kab / kota			100,00	100,00				
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan peta potensi dan peluang usaha kab / kota			100	100				
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang Dipromosikan			100%	100%				
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan			1,00	1,00				
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan			1	1				
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ijin yang terbit tepat waktu			100	100				
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	a. jumlah usaha yang telah memenuhi komitmen b. jumlah usaha yang telah difasilitasi			100	100				
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan BerUsaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah izin yang terbit tepat waktu			750	750				
	Pemantauan pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	jumlah usaha yang telah memenuhi komitmen			160	160				
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terdapat Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti			25	25				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	jumlah usaha yang telah difasilitasi			160	160				
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang Dipromosikan			100%	100%				
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengawasan yang dilaksanakan			7	7				

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pembinaan yang Dilaksanakan			4	4				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah pengawasan yang dilaksanakan			3	3				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah pengawasan yang dilaksanakan			3	3				
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang Dipromosikan			100%	100%				
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah data perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi			750,00	750,00				
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan BerUsaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah data perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi			750	750				
Tahun 2022										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%						100%	60%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%						100%	70%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan						10 Dokumen	10 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan						10 Dokumen	10 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan						100%	60%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu						100%	60%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi						100%	60%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan						25 Laporan	13 Laporan	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan						100%	60%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan						20 Dokumen	10 Dokumen	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan						100%	60%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Realisasi Pakaian Dinas dan Kelengkapannya Yang Diadakan						200 Set	200 Set	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan						100%	60%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah realisasi peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan						1 Unit	1 Unit	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah realisasi peralatan rumah tangga yang diadakan						1 Unit	1 Unit	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase realisasi Bahan Logistik yang diadakan						100%	100%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah realisasi barang cetak dan penggandaan yang diadakan						2 Unit	2 Unit	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah realisasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan						50 Unit	50 Unit	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi						80%	40%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang terpenuhi						80%	40%	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah	Persentase Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terkoneksi						100%	60%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi						100%	60%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah realisasi peralatan dan mesin lainnya yang diadakan						2 Unit	1 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi						100%	60%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa surat menyurat yang terpenuhi						100%	60%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi						100%	60%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi						100%	60%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi						100%	60%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik						100%	60%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Persentase kendaraan dinas operasional atau jabatan dalam kondisi layak						100%	60%	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam kondisi layak						100%	60%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik						100%	60%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik						100%	60%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan nilai investasi						0,60%	0,11%	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan peta potensi dan peluang usaha kab / kota						100%	40%	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah potensi dan peluang investasi yang tersedia						1 Potensi	0	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi dan peluang investasi yang dipromosikan						100%	40%	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan promosi penanaman modal						100%	40%	
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi						1 Event	0	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ijin yang terbit tepat waktu						100%	48%	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan						100%	48%	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah izin yang diterbitkan						800 Izin	1205 Izin	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	jumlah usaha yang telah memenuhi komitmen						750 Izin	319 Izin	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti						5 Jenis Pengaduan	1 Jenis Pengaduan	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	jumlah usaha yang difasilitasi						50 Pemohon	9 Pemohon	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan pengendalian penanaman modal						100%	60%	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengawasan penanaman modal						100%	60%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal						500 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah bidang usaha (KLBI)						16 Bidang Usaha	12 Bidang Usaha	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi PM						100%	51%	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase data perizinan dan penanaman modal yang dipublikasikan						100%	51%	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah data perizinan dan penanaman modal yang tersedia						750 Data	374 Data	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan Pelatihan dan produktifitas tenaga kerja						88,30%	88,30%	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase sertifikat pelatihan yang diterbitkan sesuai dengan kompetensinya						244 Orang	244 Orang	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan						560 orang	16 orang	
	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di BLK						384 orang	128 orang	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair						88,30%	88,30%	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang terlayani pada pelayanan antar kerja						815 orang	291 orang	
	Pelayanan antar Kerja	jumlah pencari kerja						800 Orang	176 Orang	
		Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha						15 Orang	15 Orang	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair						80%	40%	

	Job Fair/Bursa Kerja	jumlah pencari kerja yang melamar melalui Job Market Fair (JMF)						1000 Orang	0	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang terlayani pada layanan terpadu CPMI						100%	15%	
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah peserta sosialisasi AKAN						50 Orang	0	
		Jumlah CPMI yang membuat rekom paspor						12 Orang	2 Orang	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja						70%	40%	
		Persentase Penurunan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan						55%	-29,41%	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja						70%	40%	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja						130 Perusahaan	50 Perusahaan	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja						80 Perusahaan	40 Perusahaan	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang diselesaikan dengan anjuran dan perjanjian bersama						77,20%	87,50%	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina dalam rangka pencegahan hubungan industrial						17 Perusahaan	4 Perusahaan	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah anggota SPSI yang diverifikasi						9 orang	0	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Pada Tahun 2020 Indikator Kinerja berbeda dengan tahun 2019, sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Adapun hasil analisis capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

No.	Indikator (IKU OPD)	SPM / standar nasional bila ada)	IKK (bila ada)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi					Catatan Analisa
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
1	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Penanaman Modal			1,2 %	1,3 %	1,4 %	1,5 %	1,6 %	2,00 %	0,37 %									
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			82,2 5%	82,5 0%	82,7 5%	83%	83%	83,1 1%	83,3 5%									
3	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan pada Sektor Formal dan Informal			78,3 %	83,3 %	88,3 %	93,3 %	98,3 %	81,0 9%	83,7 9%									
4	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Anjuran dan Perjanjian Bersama			77,2 %	82,2 %	87,2 %	92,2 %	97,2 %	100 %										
	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			64,5 %	69,5 %	74,5 %	79,5 %	84,5 %	53%										
5.	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja			64,5 %	80%	70%	70%	70%	52%	50%									
	Persentase Penurunan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan			77,2 %	66,7 %	55%	56%	57%	100 %	84,6 %									

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

Isu-isu strategis atau kondisi harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila kondisi yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan menghilangkan peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat.

PERMASALAHAN & ISU – ISU STRATEGIS :

Urusan Penanaman Modal

1. Potensi dan peluang potensi penanaman modal belum terinventarisasi secara lengkap dan komunikatif. Faktor faktor yang mempengaruhi diantaranya :
 - a. Data potensi masih kurang lengkap. Pada aplikasi OSS belum mengakomodir Izin Usaha Mikro, sehingga nilai investasi dari sektor mikro belum dapat dihitung secara otomatis;
 - b. Belum adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang metode penentuan potensi peluang penanaman modal;
 - c. Belum adanya prospectus investasi.
2. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan masih banyak kendala dalam proses penyelesaiannya. Faktor faktor yang mempengaruhi diantaranya :
 - a. Lambatnya pertimbangan teknis dari dinas teknis terkait;
 - b. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam proses penyelesaian IMB baik dalam hal cek lokasi lapangan, penerbitan izin dan petugas yang memahami teknis (SDM belum tersertifikasi).
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aplikasi perizinan online. Faktor faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah Sumber Daya Manusia yang belum siap dalam melaksanakan teknologi informasi;
4. Pelaksanaan penomoran perizinan online melalui SI CANTIK CLOUD masih terkendala;
5. Norma Standart Prosedur dan Kriteria pada aplikasi OSS masing – masing kementerian sering berubah;
6. Fasilitas sarana dan prasarana di MPP belum lengkap (Help Desk, Telepon antar Counter, Wi – Fi)

Urusan Tenaga Kerja

1. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Faktor – faktor yang mempengaruhi diantaranya :
 - a. Motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah dan masih mengandalkan sektor formal;
 - b. Rendahnya kesadaran calon tenaga kerja dalam meningkatkan kemampuan, kompetensi dan keterampilan diri dalam persaingan dunia kerja.
2. Kualitas pelatihan umumnya masih rendah dikarenakan kurangnya tenaga instruktur serta program pelatihan pada umumnya tidak menjamin penempatan;
3. Perusahaan yang menerapkan UMK jumlahnya masih sedikit dikarenakan banyak perusahaan yang menyatakan kurang mampu menerapkan UMK dan tidak ada sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak menerapkan UMK;
4. Kesadaran pengusaha untuk patuh terhadap aturan ketenagakerjaan masih rendah. Hal ini dikarenakan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi, peran Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja hanya melakukan fungsi pembinaan;

5. Masih terdapat kasus perselisihan hubungan industrial tiap tahunnya. Factor – factor yang mempengaruhi diantaranya :
- a. Pemahaman peraturan ketenagakerjaan oleh pekerja masih kurang;
 - b. Kurangnya monitoring dan evaluasi pasca pembinaan dan kunjungan tim deteksi dini oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Tahun 2021, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo menetapkan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 31
Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2022

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan 2022	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan 2022	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Non Urusan											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB//KOTA	Kota Probolinggo	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100%	9.453.491.952,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Probolinggo	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100%	10.363.739.465,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100%	49.965.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100%	49.965.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	10 Dokumen	33.935.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	10 Dokumen	33.935.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	10 Dokumen	16.030.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	10 Dokumen	16.030.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	8.165.085.052,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	9.075.332.565,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100%	8.030.725.352,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100%	8.921.026.865,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	100%	126.793.900,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	100%	146.739.900,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	25 Laporan	7.565.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	25 Laporan	7.565.800,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	23.910.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	25.910.000,00	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	20 Dokumen	23.910.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	20 Dokumen	25.910.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	1.600.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Probolinggo	Jumlah Realisasi Pakaian Dinas dan Kelengkapannya Yang Diadakan	200 Set	1.600.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Probolinggo	Jumlah Realisasi Pakaian Dinas dan Kelengkapannya Yang Diadakan	200 Set	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	270.356.100,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	291.042.100,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	100%	35.812.400,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	1 Unit	49.285.400,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi peralatan rumah tangga yang diadakan	100%	1.355.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi peralatan rumah tangga yang diadakan	1 Unit	1.815.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Probolinggo	Persentase realisasi Bahan Logistik yang diadakan	100%	9.999.400,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Probolinggo	Persentase realisasi Bahan Logistik yang diadakan	100%	9.999.400,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	100%	2.868.300,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	2 Unit	5.621.300,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	50 Unit	1.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	50 Unit	1.500.000,00	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	80%	4.500.000,00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	80%	4.500.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	80%	134.321.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	80%	134.321.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terkoneksi	100%	80.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terkoneksi	100%	84.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Probolinggo	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	3.625.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Probolinggo	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	3.625.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 Unit	3.625.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 Unit	3.625.000,00	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	100%	800.767.800,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Probolinggo	Persentase kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	100%	742.386.800,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Probolinggo	Persentase jasa surat menyurat yang terpenuhi	100%	69.606.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Probolinggo	Persentase jasa surat menyurat yang terpenuhi	100%	71.606.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Probolinggo	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100%	366.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Probolinggo	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100%	299.928.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100%	124.506.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100%	130.197.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Probolinggo	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	240.655.800,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Probolinggo	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	240.655.800,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Probolinggo	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	138.183.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Probolinggo	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	175.478.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Kota Probolinggo	Persentase kendaraan dinas operasional atau jabatan dalam kondisi layak	100%	36.625.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Kota Probolinggo	Persentase kendaraan dinas operasional atau jabatan dalam kondisi layak	100%	46.625.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Probolinggo	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam kondisi layak	100%	51.753.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Probolinggo	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam kondisi layak	100%	54.003.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Persentase peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	100%	39.805.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Persentase peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	100%	64.850.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Probolinggo	Persentase gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	100%	10.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Probolinggo	Persentase gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	100%	10.000.000,00	
Urusan Penanaman Modal											
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kota Probolinggo	Persentase pertumbuhan nilai investasi	0,60%	55.599.900,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kota Probolinggo	Persentase pertumbuhan nilai investasi	0,60%	55.599.900,00	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	persentase ketersediaan peta potensi dan peluang usaha kab/kota	100%	55.599.900,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	persentase ketersediaan peta potensi dan peluang usaha kab/kota	100%	55.599.900,00	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah potensi dan peluang investasi yang tersedia	1 Potensi	55.599.900,00	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah potensi dan peluang investasi yang tersedia	1 Potensi	55.599.900,00	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Probolinggo	Persentase promosi dan peluang investasi yang dipromosikan	100%	49.421.000,00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Probolinggo	Persentase promosi dan peluang investasi yang dipromosikan	100%	49.421.000,00	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase peningkatan promosi penanaman modal	100%	49.421.000,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase peningkatan promosi penanaman modal	100%	49.421.000,00	

	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Kota Probolinggo	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi	1 Event	49.421.000,00	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Kota Probolinggo	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi	1 Event	49.421.000,00	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Probolinggo	Persentase Ijin yang terbit tepat waktu	100%	246.174.400,00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Probolinggo	Persentase Ijin yang terbit tepat waktu	100%	246.174.400,00	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Probolinggo	Persentase peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	100%	246.174.400,00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Probolinggo	Persentase peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	100%	246.174.400,00	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Probolinggo	jumlah izin yang diterbitkan	800 Izin	110.765.800,00	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Probolinggo	jumlah izin yang diterbitkan	800 Izin	110.765.800,00	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Probolinggo	jumlah usaha yang telah memenuhi komitmen	750 Izin	71.159.800,00	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Probolinggo	jumlah usaha yang telah memenuhi komitmen	750 Izin	72.407.000,00	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Probolinggo	jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	5 Jenis Pengaduan	3.249.800,00	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Probolinggo	jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	5 Jenis Pengaduan	3.249.800,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Probolinggo	jumlah usaha yang difasilitasi	50 Pemohon	60.999.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Probolinggo	jumlah usaha yang difasilitasi	50 Pemohon	59.751.800,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Probolinggo	Persentase peningkatan pengendalian penanaman modal	100%	412.786.800,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Probolinggo	Persentase peningkatan pengendalian penanaman modal	100%	412.786.800,00	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	persentase pengawasan penanaman modal	100%	412.786.800,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	persentase pengawasan penanaman modal	100%	412.786.800,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Probolinggo	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	500 Pelaku Usaha	375.108.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Probolinggo	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	500 Pelaku Usaha	375.108.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Probolinggo	jumlah bidang usaha (KLBI)	16 Bidang Usaha	37.678.800,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Probolinggo	jumlah bidang usaha (KLBI)	16 Bidang Usaha	37.678.800,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Probolinggo	Persentase ketersediaan data dan informasi PM	100%	69.068.400,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Probolinggo	Persentase ketersediaan data dan informasi PM	100%	69.068.400,00	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	persentase data perizinan dan penanaman modal yang dipublikasikan	100%	69.068.400,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	persentase data perizinan dan penanaman modal yang dipublikasikan	100%	69.068.400,00	

	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Probolinggo	jumlah data perizinan dan penanaman modal yang tersedia	750 Data	69.068.400,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Probolinggo	jumlah data perizinan dan penanaman modal yang tersedia	750 Data	69.068.400,00	
Urusan Ketenagakerjaan											
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Kota Probolinggo	Persentase peningkatan Pelatihan dan produktifitas tenaga kerja	88,30%	3.363.696.460,00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Kota Probolinggo	Persentase peningkatan Pelatihan dan produktifitas tenaga kerja	88,30%	3.363.696.460,00	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Probolinggo	Persentase sertifikat pelatihan yang diterbitkan sesuai dengan kompetensinya	244 Orang	3.363.696.460,00	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Probolinggo	Persentase sertifikat pelatihan yang diterbitkan sesuai dengan kompetensinya	244 Orang	3.363.696.460,00	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Probolinggo	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	144 orang	3.269.187.850,00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Probolinggo	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	144 orang	3.269.187.850,00	
	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Kota Probolinggo	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di BLK	384 orang	94.508.610,00	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Kota Probolinggo	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di BLK	384 orang	94.508.610,00	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Probolinggo	Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair	88,30%	121.294.150,00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Probolinggo	Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair	88,30%	121.294.150,00	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah peserta yang terlayani pada pelayanan antar kerja	815 orang	81.299.650,00	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah peserta yang terlayani pada pelayanan antar kerja	815 orang	81.299.650,00	
	Pelayanan antar Kerja	Kota Probolinggo	jumlah pencari kerja	800 Orang	81.299.650,00	Pelayanan antar Kerja	Kota Probolinggo	jumlah pencari kerja	800 Orang	81.299.650,00	
		Kota Probolinggo	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 Orang			Kota Probolinggo	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 Orang		
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Probolinggo	Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair	80%	34.994.800,00	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Probolinggo	Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair	80%	34.994.800,00	
	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Probolinggo	jumlah pencari kerja yang melamar melalui Job Market Fair (JMF)	1000 Orang	34.994.800,00	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Probolinggo	jumlah pencari kerja yang melamar melalui Job Market Fair (JMF)	1000 Orang	34.994.800,00	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase peserta yang terlayani pada layanan terpadu CPMI	100%	4.999.700,00	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	Kota Probolinggo	Persentase peserta yang terlayani pada layanan terpadu CPMI	100%	4.999.700,00	
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kota Probolinggo	Jumlah peserta sosialisasi AKAN	50 Orang	4.999.700,00	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kota Probolinggo	Jumlah peserta sosialisasi AKAN	50 Orang	4.999.700,00	
		Kota Probolinggo	Jumlah CPMI yang membuat rekom paspor	12 Orang			Kota Probolinggo	Jumlah CPMI yang membuat rekom paspor	12 Orang		

	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Probolinggo	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	70%	170.263.200,00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Probolinggo	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	70%	170.263.200,00	
			Persentase Penurunan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	55%				Persentase Penurunan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	55%		
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja	70%	47.739.300,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja	70%	47.739.300,00	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Probolinggo	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja	130 Perusahaan	9.759.500,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Probolinggo	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja	130 Perusahaan	9.759.500,00	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Probolinggo	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja	80 Perusahaan	37.979.800,00	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Probolinggo	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja	80 Perusahaan	37.979.800,00	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Kota Probolinggo	Persentase kasus yang diselesaikan dengan anjuran dan perjanjian bersama	77,20%	122.523.900,00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Kota Probolinggo	Persentase kasus yang diselesaikan dengan anjuran dan perjanjian bersama	77,20%	122.523.900,00	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah perusahaan yang dibina dalam rangka pencegahan hubungan industrial	17 Perusahaan	112.523.900,00	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah perusahaan yang dibina dalam rangka pencegahan hubungan industrial	17 Perusahaan	112.523.900,00	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Probolinggo	Jumlah anggota SPSI yang diverifikasi	9 orang	10.000.000,00	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Probolinggo	Jumlah anggota SPSI yang diverifikasi	9 orang	-	
Jumlah Total					13.941.796.262,00	Jumlah Total					14.852.043.775,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahun 2022 Walikota Probolinggo mempunyai tema pembangunan yaitu AKSELERASI PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA KOTA PROBOLINGGO YANG BERDAYA SAING.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo mengampu 3 (tiga) Misi Pembangunan Kota Probolinggo yaitu :

1. Pembangunan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor potensial;
2. Sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas;
3. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Dinas Penanaman modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam mendukung

Prioritas pembangunan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Prioritas Pembangunan Kota	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Uraian Kegiatan
1.	Ketahanan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM untuk mendorong Pemulihan Ekonomi sektor pariwisata, industri dan investasi	Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan kebijakan Investasi	Program Peningkatan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemetaan peluang potensi investasi - Meningkatkan pemantauan kinerja penanaman modal - Meningkatkan promosi investasi - Meningkatkan penyebaran informasi penanaman modal
2.	Peningkatan kualitas, produktifitas dan daya saing SDM	Meningkatkan produktivitas dan penempatan tenaga kerja didukung hubungan industrial yang kondusif	penempatan, perluasan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelatihan kerja yang banyak tepat - Mengadakan MOU dengan BLK dan LPK swasta, - Mengoptimalkan kerjasama dengan perusahaan terkait permintaan lowongan kerja - pendampingan masalah ketegakerjaan/hubungan industrial
3.	Peningkatan Ketertiban umum, tata kelola pemerintahan dan kualitas	Meningkatkan manajemen dan SDM pelayanan publik	peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan fasilitas pelayanan pada sarana dan prasaran Mal Pelayanan Publik - Mengoptimalkan pelaksanaan perizinan online (pengoptimalan SI CANTIK CLOUD) - Memberikan pendampingan OSS

Selain program dan kegiatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo untuk perencanaan pembangunan juga mengakomodir usulan program kegiatan yang berasal dari bawah / masyarakat (bottom up).

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

No.	Program/Kegiatan Tahun 2022	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume
2.18.01	Urusan Penanaman Modal		Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal	
2.07.03	Urusan Ketenagakerjaan		Persentase peningkatan Pelatihan dan produktifitas tenaga kerja	
1	Pelatihan Kopi Barista Bagi pencari kerja Berbasis Masyarakat	PEMUDA RW 05 JL MUSI, Kota Probolinggo, Kedopok, Kedopok, Seluruh Kelurahan/Desa	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	16 Peserta
2	Pelatihan Barbershop Bagi pencari kerja Berbasis Masyarakat	PEMUDA RW 04, Kota Probolinggo, Kedopok, Kedopok, Seluruh Kelurahan/Desa	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	16 Peserta
3	Pelatihan Jahit Sandal Hotel Bagi pencari kerja Berbasis Masyarakat	PEMUDA RW 01, Kota Probolinggo, Kedopok, Kedopok, Seluruh Kelurahan/Desa	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	16 Peserta
4	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. Walikota Gatot RT.004 RW. 005, Kota Probolinggo, Kedopok, Kedopok, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
5	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. Prof Dr. Hamka 77 RT. 003 RW.005, Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
6	Pelatihan Las Listrik Bagi pencari kerja Berbasis Masyarakat	Dusun Krajan RT.03 RW.05, Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan, Seluruh Kelurahan/Desa	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	16 Peserta
7	Pelatihan Barbershop Bagi pencari kerja Berbasis Masyarakat	Dusun Krajan RT.04 RW.05, Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan, Seluruh Kelurahan/Desa	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	16 Peserta
8	Pelatihan Kopi Barista Bagi pencari kerja Berbasis Masyarakat	Dusun Krajan RT.04 RW.05, Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan, Seluruh Kelurahan/Desa	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	16 Peserta
9	Pelatihan Otomotif roda dua Bagi pencari kerja Berbasis Masyarakat	Dusun Melati RT.02 RW.01, Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan, Seluruh Kelurahan/Desa	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	16 Peserta
10	Pelatihan Barbershop Bagi pencari kerja Berbasis Masyarakat	Jl. Sunan Ampel RW 09 RT 02, Kota Probolinggo, Kedopok, Kedopok, Seluruh Kelurahan/Desa	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	16 Peserta
11	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Dusun Krajan RT.005 RW.002, Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
12	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Perum STI RE.2 No.20 RT. 003 RW. 007, Kota Probolinggo, Wonoasih, Wonoasih, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha

13	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. Wilis No.29 RT/004 RW.002, Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
14	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. Mayjen Haryono X/36 A RT. 008 RW.003, Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
15	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. Mastrip GG.II RT.003 RW. 013, Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
16	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. Imam Bonjol 39 RT. 004 RW.005, Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
17	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Dusun Sumber RT. 002 RW. 005, Kota Probolinggo, Kedopak, Kedopak, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
18	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. Letjend Sutoyo GG. V RT. 006 RW. 003, Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
19	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. KH. Hasan Gg. Hijrah RT. 002 RW, 003, Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
20	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. Sunan Drajad RT. 001 RW.003, Kota Probolinggo, Wonoasih, Wonoasih, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
21	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. Sunan Ampel RT. 003 RW. 007, Kota Probolinggo, Kedopak, Kedopak, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
22	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Lingkungan Esan RT.007 RW. 001, Kota Probolinggo, Wonoasih, Wonoasih, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
23	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. Kapten Patimura 3/77 RT. 011 RW. 009, Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha

3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kota Probolinggo. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional, maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Timur 2005–2025, RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, dan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2022.

1. Berdasarkan sasaran Renstra Perangkat Daerah ***“meningkatnya realisasi investasi dengan arah kebijakan”*** dengan arah kebijakan :
 - ❖ Pengembangan Mal Pelayanan Publik yang mendukung kemudahan perizinan
 - ❖ Mengoptimalkan system OSS (Online Single Submission)
 - ❖ Menjaga iklim investasi daerah
2. Berdasarkan sasaran Renstra Perangkat Daerah ***“meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah ”*** dengan arah kebijakan:
 - ❖ Mengembangkan e-gov dalam segala lini bidang perangkat daerah
 - ❖ Meningkatkan pelayanan public melalui memonitoring SOP dan Standar Pelayanan yang berkualitas
 - ❖ Sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang pelayanan public yang berbasis e-gov dan mempermudah akses untuk masyarakat
3. Berdasarkan sasaran Renstra Perangkat Daerah ***“meningkatnya kualitas penyerapan tenaga kerja ”*** dengan arah kebijakan:
 - ❖ Menguatkan program Jaminan Sosial bidang ketenagakerjaan
 - ❖ Menjamin proporsi upah yang proporsional dan tepat sasaran
 - ❖ Meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas perlindungan dan keselamatan tenaga kerja
 - ❖ Meningkatkan kepesertaan program Jaminan Sosial
 - ❖ Meningkatkan cakupan serapan tenaga kerja pada sector – sector lain secara merata
 - ❖ Mengoptimalkan laju pertumbuhan PDB perkapita tenaga kerja untuk efektifitas pembangunan

- ❖ Memberikan pelatihan untuk peningkatan skill terhadap sektor strategis dan potensial melalui balai latihan kerja

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.1 TUJUAN

Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, perlu dirumuskan beberapa tujuan dalam jangkauan waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan asumsi bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tetap konsisten dengan tujuan yang dikembangkan dalam periode tersebut.

Tujuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yaitu :

- a. meningkatnya nilai investasi daerah;
- b. meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public pemerintahan;
- c. meningkatnya kualitas penyerapan tenaga kerja.

Penetapan tujuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo pada umumnya didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2019 - 2024 dan mengarahkan perumusan sasaran, program dan kegiatan.

3.2.2 SASARAN

Sasaran strategis adalah penjabaran dari Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam Sasaran dirancang pula **Indikator Pencapaian Sasaran**, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta berdasarkan arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir (2019 - 2024), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan peluang investasi daerah;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Meningkatnya penempatan tenaga kerja pada sector formal dan informal;
- d. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja.

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019- 2024, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD dijabarkan oleh OPD dalam Renstra OPD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke OPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan OPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra OPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, sebagaimana tabel T-C.33.

Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo merumuskan 2 (dua) urusan, 9 (Sembilan) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan. Total keseluruhan kebutuhan dana sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 14.852.043.775,- dengan sumber dana dari DAU, DAK Non Fisik, DBHCHT, dan Dana Hibah

4.2. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022 dan perkiraan maju Tahun 2022 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kota Probolinggo
Nama Perangkat Daerah : DPMPSTPNAKER KOTA PROBOLINGGO**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output) Tahun 2022	Rencana Tahun P.APBD 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tahun 2022									
Non Urusan									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Kota Probolinggo	100%	10.363.739.465,00	DAU			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Kota Probolinggo	100%	49.965.000,00	DAU			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Kota Probolinggo	20 Dokumen	33.935.000,00	DAU			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Kota Probolinggo	20 Dokumen	16.030.000,00	DAU			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	100%	9.075.332.565,00	DAU			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Kota Probolinggo	100%	8.921.026.865,00	DAU			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	Kota Probolinggo	100%	146.739.900,00	DAU			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Kota Probolinggo	25 Laporan	7.565.800,00	DAU			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	100	25.910.000,00	DAU			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Kota Probolinggo	20 Dokumen	25.910.000,00	DAU			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	100%	-	DAU			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Realisasi Pakaian Dinas dan Kelengkapannya Yang Diadakan	Kota Probolinggo	200 Set	0	DAU			

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	100%	291.042.100,00	DAU			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah realisasi peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kota Probolinggo	1 Unit	49.285.400,00	DAU			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah realisasi peralatan rumah tangga yang diadakan	Kota Probolinggo	1 Unit	1.815.000,00	DAU			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase realisasi Bahan Logistik yang diadakan	Kota Probolinggo	100%	9.999.400,00	DAU			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah realisasi barang cetak dan penggandaan yang diadakan	Kota Probolinggo	2 Unit	5.621.300,00	DAU			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah realisasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	Kota Probolinggo	50 Unit	1.500.000,00	DAU			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	Kota Probolinggo	80%	4.500.000,00	DAU			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Probolinggo	80%	134.321.000,00	DAU			
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah	Persentase Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terkoneksi	Kota Probolinggo	100%	84.000.000,00	DAU			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Probolinggo	100%	3.625.000,00	DAU			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah realisasi peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kota Probolinggo	2 Unit	3.625.000,00	DAU			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	Kota Probolinggo	100%	742.386.800,00	DAU			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa surat menyurat yang terpenuhi	Kota Probolinggo	100%	71.606.000,00	DAU			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Kota Probolinggo	100%	299.928.000,00	DAU			
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	Kota Probolinggo	100%	130.197.000,00	DAU			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Kota Probolinggo	100%	240.655.800,00	DAU			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Kota Probolinggo	100%	175.478.000,00	DAU			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Persentase kendaraan dinas operasional atau jabatan dalam kondisi layak	Kota Probolinggo	100%	46.625.000,00	DAU			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam kondisi layak	Kota Probolinggo	100%	54.003.000,00	DAU			

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	Kota Probolinggo	100%	64.850.000,00	DAU			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	Kota Probolinggo	100%	10.000.000,00	DAU			
Urusan Penanaman Modal											
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan nilai investasi	Kota Probolinggo	0,60%	55.599.900,00	DAU			
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan peta potensi dan peluang usaha kab / kota	Kota Probolinggo	100%	55.599.900,00	DAU			
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah potensi dan peluang investasi yang tersedia	Kota Probolinggo	1 Potensi	55.599.900,00	DAU			
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi dan peluang investasi yang dipromosikan	Kota Probolinggo	100%	49.421.000,00	DAU			
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan promosi penanaman modal	Kota Probolinggo	100%	49.421.000,00	DAU			
			Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi	Kota Probolinggo	1 Event	49.421.000,00	DAU			
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ijin yang terbit tepat waktu	Kota Probolinggo	100%	246.174.400,00	DAU			
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	Kota Probolinggo	100%	246.174.400,00	DAU			
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah izin yang diterbitkan	Kota Probolinggo	800 Izin	110.765.800,00	DAU			
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	jumlah usaha yang telah memenuhi komitmen	Kota Probolinggo	750 Izin	72.407.000,00	DAU			
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Kota Probolinggo	5 Jenis Pengaduan	3.249.800,00	DAU			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	jumlah usaha yang difasilitasi	Kota Probolinggo	50 Pemohon	59.751.800,00	DAU			
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan pengendalian penanaman modal	Kota Probolinggo	100%	412.786.800,00	DAU, DAK Non Fisik			
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	persentase pengawasan penanaman modal	Kota Probolinggo	100%	412.786.800,00	DAU, DAK Non Fisik			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Probolinggo	500 Pelaku Usaha	375.108.000,00	DAU, DAK Non Fisik			

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah bidang usaha (KLBI)	Kota Probolinggo	16 Bidang Usaha	37.678.800,00	DAU,DAK Non Fisik			
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi PM	Kota Probolinggo	100%	69.068.400,00	DAU			
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase data perizinan dan penanaman modal yang dipublikasikan	Kota Probolinggo	100%	69.068.400,00	DAU			
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah data perizinan dan penanaman modal yang tersedia	Kota Probolinggo	750 Data	69.068.400,00	DAU			
Urusan Ketenagakerjaan											
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan Pelatihan dan produktifitas tenaga kerja	Kota Probolinggo	88,30%	3.363.696.460,00	DAU, DBHCHT			
			Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase sertifikat pelatihan yang diterbitkan sesuai dengan kompetensinya	Kota Probolinggo	244 Orang	3.363.696.460,00	DAU, DBHCHT			
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	Kota Probolinggo	144 orang	3.269.187.850,00	DAU, DBHCHT			
			Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di BLK	Kota Probolinggo	384 orang	94.508.610,00	DAU			
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair	Kota Probolinggo	88,30%	121.294.150,00	DAU			
			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang terlayani pada pelayanan antar kerja	Kota Probolinggo	815 orang	81.299.650,00	DAU			
			Pelayanan antar Kerja	jumlah pencari kerja	Kota Probolinggo	800 Orang	81.299.650,00	DAU			
				Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	Kota Probolinggo	15 Orang		DAU			
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair	Kota Probolinggo	80%	34.994.800,00	DAU			
			Job Fair/Bursa Kerja	jumlah pencari kerja yang melamar melalui Job Market Fair (JMF)	Kota Probolinggo	1000 Orang	34.994.800,00	DAU			
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang terlayani pada layanan terpadu CPMI	Kota Probolinggo	100%	4.999.700,00	DAU			
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah peserta sosialisasi AKAN	Kota Probolinggo	50 Orang	4.999.700,00	DAU			
				Jumlah CPMI yang membuat rekom paspor	Kota Probolinggo	12 Orang					
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	Kota Probolinggo	70%	170.263.200,00	DAU			
				Persentase Penurunan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan		55%					

			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitas pemenuhan persyaratan kerja	Kota Probolinggo	70%	47.739.300,00	DAU			
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitas pemenuhan persyaratan kerja persyaratan kerja	Kota Probolinggo	130 Perusahaan	9.759.500,00	DAU			
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitas pemenuhan persyaratan kerja persyaratan kerja	Kota Probolinggo	80 Perusahaan	37.979.800,00	DAU			
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang diselesaikan dengan anjuran dan perjanjian bersama	Kota Probolinggo	77,20%	122.523.900,00	DAU			
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina dalam rangka pencegahan hubungan industrial	Kota Probolinggo	17 Perusahaan	122.523.900,00	DAU			
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah anggota SPSI yang diverifikasi	Kota Probolinggo	9 orang	-	DAU			
Total								14.852.043.775,00			
Tahun 2023											
Urusan Penanaman Modal											
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan nilai investasi	Kota Probolinggo					0.7%	102.290.000
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan peta potensi dan peluang usaha kab / kota	Kota Probolinggo					100%	102.290.000
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha Kab/Kota	Kota Probolinggo					1 Dokumen	102.290.000
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi dan peluang investasi yang dipromosikan	Kota Probolinggo					100%	22.710.000
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase peningkatan promosi penanaman modal	Kota Probolinggo					100%	22.710.000
			Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kab/kota	Kota Probolinggo					1 Dokumen	22.710.000
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ijin yang terbit tepat waktu	Kota Probolinggo					100%	268.836.000
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota	Persentase peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	Kota Probolinggo					100%	268.836.000

			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Probolinggo					2700 Pelaku Usaha	164.750.500
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Probolinggo					750 Kegiatan Usaha	88.685.500
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Probolinggo					60 Orang	1.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Probolinggo					50 Orang	14.400.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan pengendalian penanaman modal	Kota Probolinggo					100%	25.000.000
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	persentase pengawasan penanaman modal	Kota Probolinggo					100%	25.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kota Probolinggo					50 Kegiatan Usaha	25.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi PM	Kota Probolinggo					100%	59.690.000
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase data perizinan dan penanaman modal yang dipublikasikan	Kota Probolinggo					100%	59.690.000
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Probolinggo					78 Dokumen	59.690.000
Non Urusan											
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Kota Probolinggo					100%	7.300.427.046
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Kota Probolinggo					100%	117.498.500
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Probolinggo					10 Laporan	45.037.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo					10 Laporan	72.461.500
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo					100	4.354.226.651

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Probolinggo					37 orang/bulan	4.200.128.151
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo					183 Dokumen	143.343.500
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah	Kota Probolinggo					25 Laporan	10.755.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo					100%	14.500.000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Probolinggo					4 Laporan	14.500.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	Kota Probolinggo					100%	47.675.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Probolinggo					3 Paket	32.975.000
			Monitoring Evaluasi dan Penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Probolinggo					2 Dokumen	14.700.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo					100%	579.543.900
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Probolinggo					12 paket	66.359.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Probolinggo					6 Paket	13.877.400
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Probolinggo					72 Dokumen	7.150.000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo					6 Laporan	8.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Kota Probolinggo					50 Laporan	204.940.000
			Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kota Probolinggo					100 Dokumen	9.787.500
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah	Kota Probolinggo					12 Dokumen	269.430.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Probolinggo					100%	984.364.495
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Probolinggo					166 unit	984.364.495

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	Kota Probolinggo					100%	908.985.250
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Probolinggo					12 Laporan	423.411.750
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantork yang disediakan	Kota Probolinggo					18 Laporan	485.573.500
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Kota Probolinggo					100%	293.633.250
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Probolinggo					16 Unit	97.955.750
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Probolinggo					186 Unit	125.677.500
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Probolinggo					1 Unit	70.000.000
Urusan Ketenagakerjaan											
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan Pelatihan dan produktifitas tenaga kerja	Kota Probolinggo					99,3%	334.176.820
			Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase sertifikat pelatihan yang diterbitkan sesuai dengan kompetensinya	Kota Probolinggo					244 sertifikat	334.176.820
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang mendapatkan fasilitas pelatihan pada tahun n	Kota Probolinggo					48 orang	133.038.300
			Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah Kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktifitas pada tahun n	Kota Probolinggo					9 Lembaga	201.138.520
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	Kota Probolinggo					99,3%	98.671.500
			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang terlayani pada pelayanan antar kerja	Kota Probolinggo					820 Orang	86.686.500
			Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	Kota Probolinggo					40 orang	27.750.000
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Kota Probolinggo					20 orang	58.936.500
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair	Kota Probolinggo					80%	9.075.000
			Job Fair/Bursa Kerja	jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui melalui Job Market Fair (JMF) atau bursa kerja	Kota Probolinggo					280 orang	9.075.000

			Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang terlayani pada layanan terpadu CPMI	Kota Probolinggo					100%	2.910.000
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	Kota Probolinggo					2 orang	2.910.000
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	Kota Probolinggo					70%	100.569.800
				Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	Kota Probolinggo					56%	
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja	Kota Probolinggo					70%	39.999.800
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	Kota Probolinggo					4 Laporan	39.999.800
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan anjuran dan perjanjian bersama	Kota Probolinggo					79%	60.570.000
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Kota Probolinggo					15 Perkara	60.570.000
Jumlah Total											8.312.371.166

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022 merupakan landasan fundamental dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan PAPBD. Selain itu Rencana Kinerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022 merupakan pengendali dan pengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tahun lalu dan sebagai acuan untuk kegiatan yang akan datang.

Undang-undang jangka Panjang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo harus selalu menjaga kualitas kinerja, karena hal tersebut akan terkait langsung dengan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah di Kota Probolinggo. Dengan terselesainya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022 ini semoga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Probolinggo.